

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Agenda yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 ini memuat 17 tujuan dan 169 target yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi. Salah satu tujuan yang menjadi perhatian utama adalah Tujuan 10 (SDGs 10), yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara (*reduced inequalities*).

Salah satu target utama SDGs 10 adalah target 10.1 yang secara eksplisit mengamanatkan agar pertumbuhan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terbawah tumbuh lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Target ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga pemerataan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan yang setara pentingnya dengan pertumbuhan (*United Nations, 2025*).

Sebagai negara yang berkomitmen melaksanakan SDGs, Indonesia telah mengadopsi agenda tersebut ke dalam kerangka kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta mengintegrasikannya ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun demikian, upaya penurunan ketimpangan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.

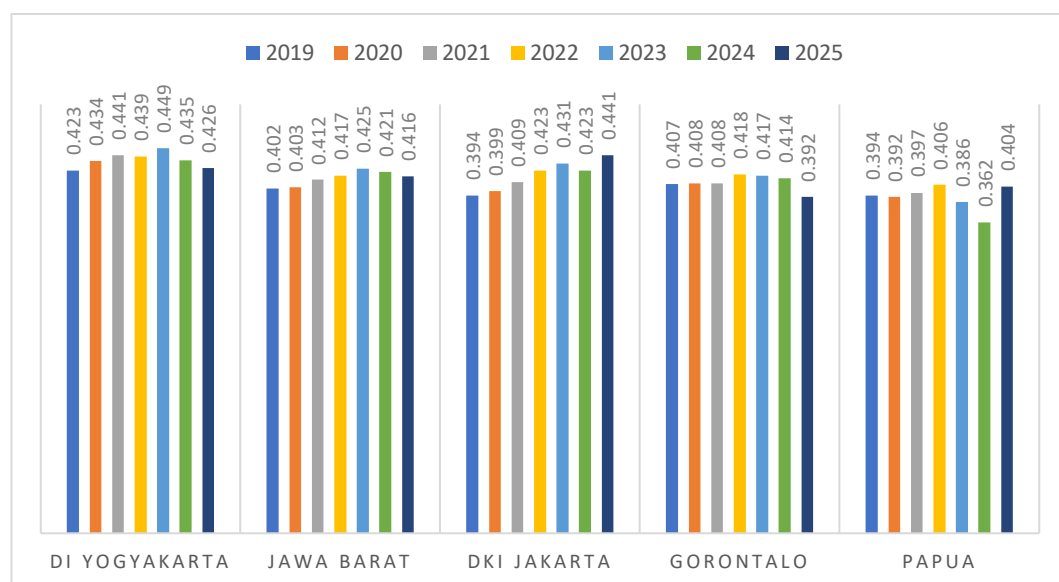
Persoalan ketimpangan pendapatan menjadi semakin kompleks apabila ditinjau pada tingkat provinsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, Gini Ratio nasional Indonesia tercatat sebesar 0,375. Namun, DKI Jakarta (0,441), DI Yogyakarta (0,426), Jawa Barat (0,416), Papua (0,404), dan Gorontalo (0,392) memiliki Gini Ratio di atas angka nasional (BPS, 2025), yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif lebih tinggi. Kelima provinsi tersebut juga memiliki karakteristik yang beragam. DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, DI Yogyakarta memiliki capaian pembangunan manusia yang baik namun ketimpangannya masih persisten, sedangkan Gorontalo dan Papua masih menghadapi tantangan pembangunan, terutama keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar.

Keragaman karakteristik ini mengindikasikan bahwa akar persoalan ketimpangan di setiap provinsi tidak seragam, sehingga membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Provinsi-provinsi yang menjadi objek penelitian tersebut merupakan wilayah strategis dalam mendukung pencapaian SDGs 10 di Indonesia, karena upaya pengurangan ketimpangan pada wilayah-wilayah dengan tingkat ketimpangan relatif tinggi akan berkontribusi terhadap pencapaian target pengurangan kesenjangan pada tahun 2030.

Tingginya ketimpangan di DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan bahwa besarnya aktivitas ekonomi, industrialisasi, serta tingginya konsentrasi investasi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok

masyarakat. Kondisi ini diduga terjadi karena manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, pendidikan, dan peluang usaha. Sementara itu, DI Yogyakarta secara konsisten mencatat Rasio Gini yang tinggi meskipun memiliki capaian pembangunan manusia yang relatif baik, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia belum secara otomatis mampu menciptakan pemerataan pendapatan. Di sisi lain, Gorontalo dan Papua masih menghadapi keterbatasan kesempatan kerja, produktivitas ekonomi yang relatif rendah, serta akses terhadap kegiatan ekonomi, sehingga manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata dan berkontribusi terhadap tingginya ketimpangan pendapatan.

Berikut adalah gambar rasio gini lima provinsi dengan tingkat ketimpangan tinggi periode 2019–2025:



Gambar 1. 1 Data Gini Rasio 5 Provinsi dengan Ketimpangan Tinggi Tahun 2019-2025 (Desimal)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Grafik pada Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan Rasio Gini pada lima provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia selama periode 2019–2025, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Papua. Secara umum, nilai Rasio Gini pada kelima provinsi tersebut berada pada kisaran 0,36–0,44 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masih tergolong sedang hingga tinggi. DI Yogyakarta secara konsisten memiliki Rasio Gini tertinggi, yaitu meningkat dari 0,423 pada tahun 2019 menjadi 0,441 pada tahun 2022 sebelum kembali menurun menjadi 0,423 pada tahun 2025. Sementara itu, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Gorontalo menunjukkan pergerakan Rasio Gini yang relatif stabil, sedangkan Papua mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat pada tahun 2025.

Berdasarkan perkembangan selama periode penelitian, peningkatan Rasio Gini di DI Yogyakarta pada tahun 2019–2022 menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pendapatan. Struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pendidikan, jasa, dan pariwisata menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki modal, aset, dan tingkat pendidikan lebih tinggi. Akibatnya, distribusi pendapatan masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu sehingga DI Yogyakarta secara konsisten menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.

Di Jawa Barat dan DKI Jakarta, Rasio Gini cenderung stabil dengan sedikit peningkatan pada periode 2021–2023. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa

pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan investasi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pendapatan. Di DKI Jakarta, tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi, sektor keuangan, dan jasa modern menyebabkan peningkatan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Sementara itu, di Jawa Barat, perkembangan sektor industri manufaktur dan kawasan perkotaan belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan karena masih terdapat perbedaan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan kesempatan kerja antarwilayah.

Berbeda dengan kedua provinsi tersebut, Gorontalo menunjukkan Rasio Gini yang relatif stabil selama periode penelitian. Namun, kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi karena struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian dan usaha berskala kecil dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Dengan demikian, relatif stabilnya Rasio Gini di Gorontalo lebih dipengaruhi oleh kesamaan tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah dibandingkan pemerataan kesejahteraan.

Papua menunjukkan perkembangan yang berbeda dibandingkan provinsi lainnya. Rasio Gini mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat pada tahun 2025. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, perluasan program perlindungan sosial, serta perubahan wilayah administrasi setelah terbentuknya beberapa daerah otonomi baru yang turut memengaruhi distribusi data sosial ekonomi. Namun, meningkatnya kembali Rasio Gini pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan fenomena tersebut disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah dijelaskan dalam teori pembangunan ekonomi. Tingginya ketimpangan pendapatan pada beberapa provinsi tersebut sejalan dengan teori Todaro dan Smith (2011) yang menyatakan bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh perbedaan kepemilikan aset, kesempatan kerja, tingkat pendidikan, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta produktivitas masyarakat. Selain itu, teori ketimpangan regional Williamson menjelaskan bahwa perbedaan tingkat pembangunan dan konsentrasi aktivitas ekonomi antarwilayah menyebabkan hasil pembangunan tidak terdistribusi secara merata sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan di masyarakat (Rasendriya *et al.*, 2025).

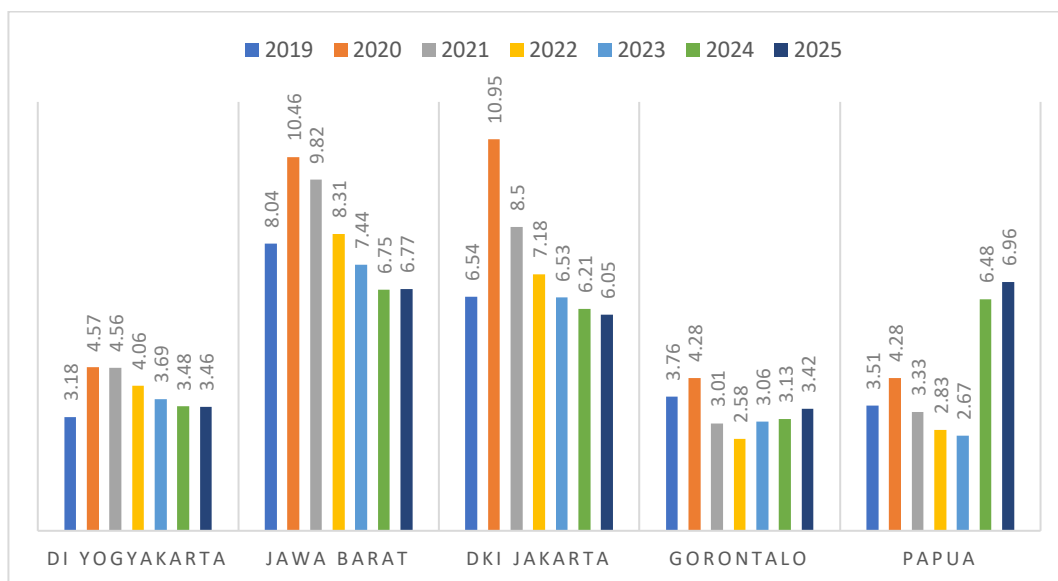
Temuan empiris dari penelitian terdahulu turut mendukung teori tersebut. Fiyantika *et al.*, (2025), yang menggunakan variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta Rahman *et al.*, (2023), yang menggunakan variabel PDRB per kapita, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan dan menemukan bahwa ketimpangan masih mencerminkan belum meratanya hasil pembangunan antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Temuan tersebut sejalan dengan teori Todaro dan Smith serta teori ketimpangan regional Williamson.

Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan adalah pengangguran. Menurut teori Keynes, pengangguran terjadi akibat rendahnya permintaan agregat sehingga perusahaan mengurangi produksi

dan tidak menyerap tenaga kerja secara optimal. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh pendapatan, sementara kelompok yang bekerja tetap memperoleh penghasilan, sehingga memperbesar ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin besar ketimpangan pendapatan (Hartati, 2021).

Pengangguran masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam perekonomian Indonesia karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,82 persen, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, jumlah pengangguran masih mencapai sekitar 7,2 juta orang sehingga menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat usia kerja (Badan Pusat Statistik, 2024).

Ketimpangan pendapatan dan pengangguran di Indonesia menunjukkan kondisi yang berbeda antar provinsi. Perbedaan struktur ekonomi, tingkat pembangunan, dan kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan kerja menyebabkan tingkat ketimpangan dan pengangguran menjadi tidak merata. Hal ini terlihat dari perbedaan nilai Rasio Gini di setiap provinsi yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi masih belum terdistribusi secara merata. Berikut adalah gambar tingkat pengangguran terbuka 6 tahun terakhir dalam 5 provinsi di Indonesia periode 2019-2025:



Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka pada 5 Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada lima provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia selama periode 2019–2025, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Papua. Secara umum, tingkat pengangguran pada kelima provinsi tersebut mengalami fluktuasi dengan lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2020, kemudian berangsur menurun seiring membaiknya kondisi perekonomian. DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, sedangkan Gorontalo secara konsisten memiliki tingkat pengangguran terendah selama periode penelitian.

Berdasarkan perkembangan selama periode penelitian, DKI Jakarta mengalami peningkatan tingkat pengangguran dari sekitar 6,54 persen pada tahun 2019 menjadi 10,95 persen pada tahun 2020. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh

perlambatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan pembatasan kegiatan usaha serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada sektor perdagangan, transportasi, perhotelan, dan jasa. Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, tingkat pengangguran di DKI Jakarta terus menurun hingga tahun 2025. Namun demikian, tingkat pengangguran di provinsi ini masih relatif tinggi karena tingginya arus pencari kerja dari berbagai daerah yang tidak selalu diimbangi dengan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja.

Jawa Barat menunjukkan pola perkembangan yang hampir serupa dengan DKI Jakarta. Tingkat pengangguran meningkat tajam pada tahun 2020 sebagai dampak menurunnya aktivitas industri manufaktur yang merupakan sektor utama perekonomian daerah. Sebagai salah satu pusat industri nasional, berkurangnya kapasitas produksi dan penyesuaian jumlah tenaga kerja menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Meskipun tingkat pengangguran terus menurun setelah kondisi ekonomi membaik, Jawa Barat tetap menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi karena besarnya jumlah penduduk usia kerja serta pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja baru.

DI Yogyakarta juga mengalami peningkatan tingkat pengangguran pada tahun 2020 akibat melemahnya aktivitas sektor pendidikan, pariwisata, dan usaha mikro yang menjadi penopang utama perekonomian daerah. Menurunnya jumlah wisatawan dan terbatasnya aktivitas pendidikan tatap muka mengurangi permintaan tenaga kerja pada berbagai sektor jasa. Setelah aktivitas ekonomi kembali pulih,

tingkat pengangguran di DI Yogyakarta berangsur menurun meskipun masih mengalami fluktuasi hingga tahun 2025.

Berbeda dengan ketiga provinsi tersebut, Gorontalo memiliki tingkat pengangguran yang relatif rendah selama periode penelitian. Namun, kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih baik karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor informal yang masih memiliki produktivitas serta tingkat pendapatan relatif rendah. Dengan demikian, rendahnya tingkat pengangguran di Gorontalo belum sepenuhnya mencerminkan tingginya kesejahteraan masyarakat.

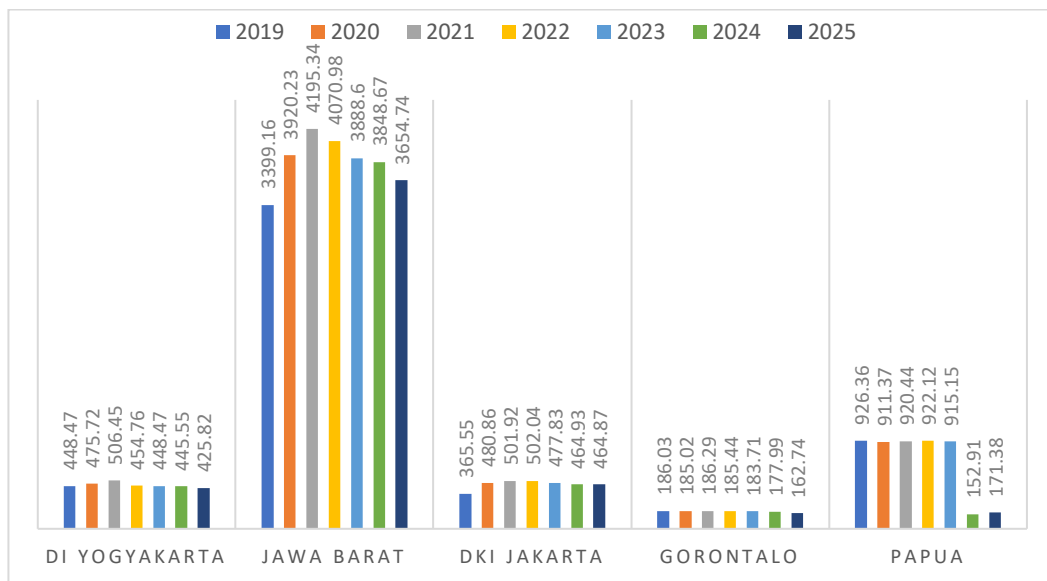
Papua menunjukkan perkembangan yang berbeda dibandingkan provinsi lainnya. Tingkat pengangguran meningkat pada awal periode pandemi, kemudian berangsur menurun seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur, aktivitas pertambangan, dan berbagai program pembangunan daerah. Namun demikian, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan, serta kesempatan kerja di beberapa wilayah menyebabkan penurunan tingkat pengangguran berlangsung lebih lambat dibandingkan provinsi lainnya.

Fenomena pada kelima provinsi tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, tetapi juga oleh karakteristik struktur ekonomi, kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja, serta kualitas sumber daya manusia. DKI Jakarta dan Jawa Barat yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi justru masih menghadapi tingkat pengangguran yang relatif besar akibat tingginya persaingan di pasar kerja. Sebaliknya, Gorontalo memiliki tingkat pengangguran yang rendah, namun masih

didominasi oleh pekerjaan di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda sehingga diduga memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap ketimpangan pendapatan.

Temuan empiris dari penelitian terdahulu turut mendukung teori tersebut. Fiyantika *et al.*, (2025) menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia. Hasil serupa juga ditemukan oleh Criollo dan Mendez (2021) serta Kumar *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, tetapi juga kemiskinan. Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial dan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (2025), persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, jumlah penduduk miskin masih tergolong besar. Selain itu, tingkat kemiskinan antarprovinsi yang berbeda-beda menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih belum merata. Berikut persentase kemiskinan pada 5 provinsi di Indonesia periode 2019–2025:



Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin pada 5 Provinsi Tahun 2019-2025 (Ribu Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin pada lima provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia selama periode 2019–2025, yaitu Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Papua. Secara umum, jumlah penduduk miskin pada kelima provinsi tersebut mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar dibandingkan provinsi lainnya, sedangkan Gorontalo memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit.

Berdasarkan perkembangan selama periode penelitian, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat meningkat dari sekitar 3.399,16 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi lebih dari 4 juta jiwa pada tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan masyarakat, khususnya pada sektor industri, perdagangan, dan usaha mikro. Seiring membaiknya kondisi

perekonomian, meningkatnya kesempatan kerja, serta pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat terus menurun hingga tahun 2025. Namun demikian, Jawa Barat tetap menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar karena memiliki jumlah penduduk paling banyak di Indonesia sehingga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan juga relatif tinggi.

DI Yogyakarta menunjukkan jumlah penduduk miskin yang relatif stabil selama periode penelitian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih besarnya proporsi masyarakat yang bekerja pada sektor informal, usaha mikro, serta sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Membaiknya sektor pariwisata dan jasa setelah pemulihan ekonomi mendorong penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap, meskipun perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan.

DKI Jakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin pada periode 2020–2022 akibat menurunnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat, terutama pekerja di sektor informal, perdagangan, transportasi, dan jasa. Setelah aktivitas ekonomi kembali membaik, jumlah penduduk miskin berangsur menurun hingga tahun 2025. Penurunan tersebut didukung oleh meningkatnya kesempatan kerja, pulihnya berbagai sektor usaha, serta program bantuan sosial yang membantu menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan provinsi tersebut, Gorontalo menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin selama periode penelitian. Kondisi ini

mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh perkembangan sektor pertanian, meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, serta pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan. Namun demikian, rendahnya jumlah penduduk miskin di Gorontalo juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit dibandingkan provinsi lainnya sehingga tidak serta-merta mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

Papua menunjukkan perkembangan yang berbeda dibandingkan provinsi lainnya. Jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi pada periode 2019–2023, kemudian menurun cukup tajam pada tahun 2025. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, perluasan program perlindungan sosial, serta perubahan cakupan wilayah administrasi setelah terbentuknya beberapa provinsi baru di Papua. Akibat pemekaran wilayah, sebagian penduduk yang sebelumnya tercatat di Provinsi Papua masuk ke provinsi hasil pemekaran sehingga jumlah penduduk miskin yang tercatat mengalami penurunan. Oleh karena itu, perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan hasil pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan administrasi wilayah.

Fenomena pada kelima provinsi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh jumlah penduduk, struktur perekonomian daerah, kesempatan kerja, efektivitas program perlindungan sosial, serta perubahan wilayah administrasi. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin terbesar meskipun merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, Papua mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025, namun masih menghadapi berbagai tantangan

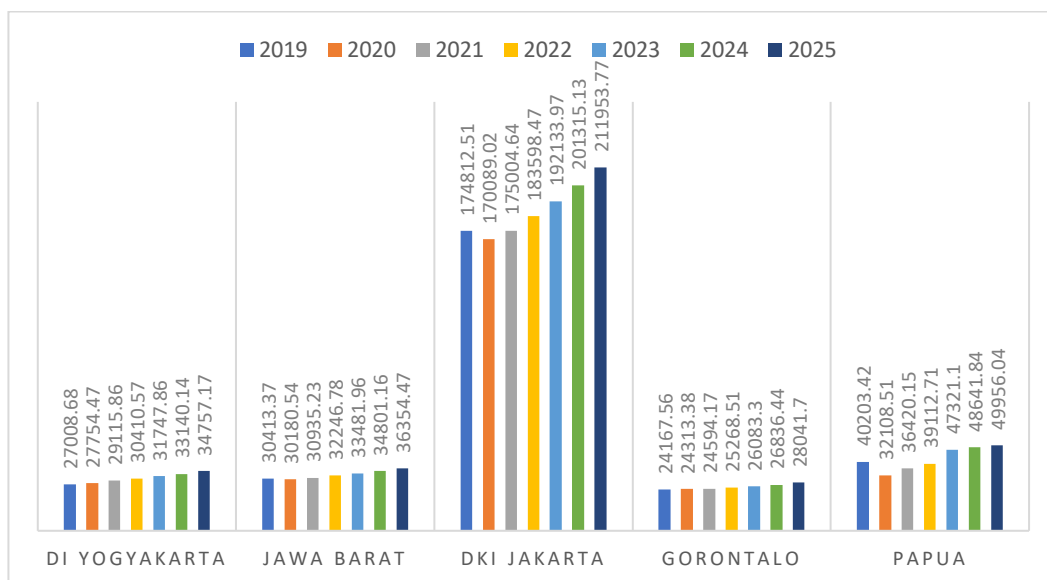
pembangunan. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2011), kemiskinan dapat memperlebar ketimpangan pendapatan karena masyarakat miskin umumnya memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, modal, dan kesempatan kerja dibandingkan kelompok masyarakat yang lebih sejahtera. Keterbatasan tersebut menyebabkan perbedaan kemampuan dalam memperoleh pendapatan sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Temuan empiris dari penelitian terdahulu turut mendukung teori tersebut. Dewi *et al.*, (2024) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Hasil serupa juga ditemukan oleh Marzalina *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan sehingga mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan.

Tingkat kemiskinan juga tidak terlepas dari kondisi perekonomian suatu daerah. Kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dapat tercermin melalui PDRB per kapita. Oleh karena itu, PDRB per kapita diduga turut memengaruhi tingkat ketimpangan

pendapatan. Di Indonesia PDRB per kapita cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, PDB per kapita Indonesia mencapai Rp78,62 juta per tahun atau sekitar 4.960,33 dolar AS per kapita. Peningkatan tersebut menunjukkan kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat, namun perbedaan PDRB per kapita antarprovinsi mengindikasikan bahwa hasil pembangunan ekonomi masih belum merata (Rahayu & Ika, 2025). Berikut perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) pada 5 provinsi di Indonesia periode 2019–2025:



Gambar 1. 4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita dengan harga konstan (ADHK) pada 5 Provinsi Tahun 2019-2025 (Ribuan Rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) pada lima provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia selama periode 2019–2025, yaitu DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Gorontalo. Secara umum, PDRB per kapita pada kelima provinsi tersebut menunjukkan

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah. Namun demikian, besarnya PDRB per kapita antarprovinsi masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar sehingga mengindikasikan adanya ketimpangan tingkat pembangunan ekonomi antarwilayah.

Berdasarkan perkembangan selama periode penelitian, DKI Jakarta secara konsisten memiliki PDRB per kapita tertinggi. Nilainya meningkat dari sekitar Rp174.812,51 ribu pada tahun 2019 menjadi lebih dari Rp200.000 ribu pada tahun 2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peran DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa keuangan, investasi, serta berbagai aktivitas bisnis nasional yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi lebih besar dibandingkan provinsi lainnya. Seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi, sektor perdagangan, jasa, keuangan, teknologi informasi, dan investasi kembali berkembang sehingga mendorong peningkatan PDRB per kapita hingga tahun 2025.

Papua menunjukkan peningkatan PDRB per kapita yang cukup signifikan selama periode penelitian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas sektor pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya belanja pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia. Selain itu, pemekaran wilayah administrasi turut memengaruhi perubahan struktur ekonomi daerah sehingga nilai PDRB per kapita Provinsi Papua mengalami penyesuaian. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya

mampu mengurangi ketimpangan pendapatan maupun kemiskinan karena manfaat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang belum melibatkan sebagian besar masyarakat.

Jawa Barat mengalami peningkatan PDRB per kapita secara bertahap selama periode penelitian. Sebagai salah satu pusat industri manufaktur nasional, perkembangan tersebut didukung oleh pulihnya aktivitas industri pengolahan, perdagangan, dan investasi. Namun demikian, besarnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan PDRB per kapita berlangsung lebih lambat dibandingkan DKI Jakarta. Selain itu, masih terdapat perbedaan tingkat pembangunan antara kawasan industri dan wilayah pedesaan sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

DI Yogyakarta juga menunjukkan peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut didukung oleh membaiknya sektor pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Meningkatnya aktivitas wisata dan pendidikan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan regional. Namun demikian, meskipun PDRB per kapitanya terus meningkat, DI Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Sementara itu, Gorontalo menjadi provinsi dengan PDRB per kapita terendah selama periode penelitian. Struktur perekonomian yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menyebabkan produktivitas ekonomi

relatif lebih rendah dibandingkan provinsi yang berbasis industri maupun jasa. Walaupun PDRB per kapita terus meningkat, laju peningkatannya relatif lebih lambat sehingga kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan juga masih terbatas.

Fenomena pada kelima provinsi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. DKI Jakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi, tetapi masih menghadapi tingkat ketimpangan yang relatif tinggi. DI Yogyakarta juga mengalami peningkatan PDRB per kapita, namun Rasio Gini tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sebaliknya, Papua mengalami peningkatan PDRB per kapita yang disertai penurunan ketimpangan pada beberapa periode, meskipun tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi. Perbedaan karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan regional belum tentu mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan apabila manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Fenomena tersebut sejalan dengan Hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita cenderung diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan karena manfaat pertumbuhan ekonomi lebih dahulu dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Seiring dengan meningkatnya tingkat pembangunan dan semakin meratanya kesempatan ekonomi, hasil-hasil pembangunan diperkirakan akan terdistribusi lebih merata sehingga ketimpangan pendapatan cenderung menurun (Yacoub *et al.*, 2026).

Temuan empiris dari penelitian terdahulu turut mendukung hipotesis tersebut. Rahman *et al.*, (2023) serta Rachmawati *et al.*, (2025) menemukan bahwa PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarwilayah dapat memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Selain PDRB per kapita, ketimpangan pendapatan juga diduga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan kemiskinan yang berbeda pada setiap daerah.

Meskipun penelitian mengenai ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan, hasil yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Pada variabel pengangguran, Fiyantika *et al.*, (2025), Criollo dan Mendez (2021), serta Kumar *et al.*, (2024) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, Meliza dan Murtala (2020) menyimpulkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh.

Pada variabel kemiskinan, Dewi *et al.*, (2024), Marzalina *et al.*, (2025), dan Kunenengan *et al.*, (2023) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, Aisyah dan Isyhadiyati (2024) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu kemiskinan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Pada variabel PDRB per kapita, Yacoub *et al.*, (2026) menemukan bahwa peningkatan PDB per kapita dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan pada tahap awal pembangunan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis Kuznets. Sebaliknya, Janah (2022) menunjukkan bahwa PDRB per kapita

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Aisyah dan Isyhadiyati (2024) menemukan pengaruh positif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan masih belum konsisten sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi mengenai pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada tingkat nasional, seluruh provinsi di Indonesia, atau wilayah tertentu dengan karakteristik yang beragam, sehingga masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji provinsi-provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini berfokus pada lima provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Papua selama periode 2019-2025. Selain menganalisis pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan, penelitian ini juga mengaitkannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 10 (Reduced Inequalities). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan pada daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi upaya pencapaian SDGs 10 di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, ketimpangan pendapatan yang persisten pada sejumlah provinsi berpotensi menghambat pencapaian SDGs 10 di Indonesia

menjelang tenggat tahun 2030. Oleh karena itu, penelitian yang menganalisis kondisi, faktor penentu, dan capaian target penurunan ketimpangan pada provinsi-provinsi berketimpangan tinggi menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Ketimpangan Pendapatan dan Pencapaian SDGs 10: Analisis pada Provinsi dengan Ketimpangan Tinggi di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2019-2025 dalam perspektif pencapaian SDGs 10?
2. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2019-2025 dalam perspektif pencapaian SDGs 10?
3. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2019-2025 dalam perspektif pencapaian SDGs 10?
4. Apakah pengangguran, kemiskinan, PDRB per kapita secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2019-2025 dalam perspektif pencapaian SDGs 10?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2019-2025 dalam perspektif pencapaian SDGs 10.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2019-2025 dalam perspektif pencapaian SDGs 10.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2019-2025 dalam perspektif pencapaian SDGs 10.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran, Kemiskinan, PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi di Indonesia tahun 2019-2025 dalam perspektif pencapaian SDGs 10.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kajian ketimpangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan, dan PDRB per kapita.

2. Menambah referensi empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan sebagai indikator pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-10 (*Reduced Inequalities*).
3. Memperkaya literatur penelitian terkait hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris mengenai faktor yang paling dominan memengaruhi ketimpangan pendapatan pada lima provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan fokus wilayah pada lima provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi serta mengaitkannya dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-10 (*Reduced Inequalities*).
3. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada Pembaca mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan serta pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.